

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam *Website* Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Indonesia

Yuni^{1*}, Vita Fitria Sari²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: yunielfana@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of regional expenditure, administrative age, regional wealth, per capita income, audit opinion, and local revenue on the quality of disclosure of financial statements on local government websites. This research is a causative research. The population and sample of the study are the financial statements of district and city governments in Indonesia in 2019. The sampling technique used is purposive sampling. The type of data is secondary data. The collection technique is carried out by the documentation method, namely collecting local government financial report data and reviewing each local government website. The data analysis method used is multiple regression analysis with regional expenditure, administrative age, regional wealth, per capita income, audit opinion, and local revenue as the dependent variable and the quality of disclosure of financial statements on local government websites as independent variables. The results showed that audit opinion and local revenue had an effect on the quality of disclosure of financial statements on local government websites, while regional spending, administrative age, regional wealth, per capita income did not affect the quality of disclosure of financial statements on local government websites.

Keywords : *Quality of Disclosure of Financial Statements on Local Government Websites; Regional Expenditures; Administrative Age; Regional Wealth; Per Capita Income; Audit Opinion; and Local Revenue.*

How to cite (APA 6th style)

Yuni & Sari, V.F. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam *Website* Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (3), 449-464.

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik di Indonesia merupakan organisasi atau lembaga yang dalam menjalankan organisasi tersebut menggunakan dana atau pemasukan dari masyarakat atau rakyat (Bastian, 2006). Hal terpenting dari organisasi sektor publik yakni bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan, yang bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Pemerintahan yang ada di daerah dan pemerintahan pusat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi sektor publik yang dipimpin oleh seorang kepala daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan daerah, untuk menjamin bagaimana mengelola suatu keuangan yang benar dan sesuai dengan kaidah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dibutuhkan dorongan serta keterbukaan yang jujur dari kepala daerah pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah dengan baik. Salah satu caranya adalah kepala daerah wajib menyampaikan Laporan-laporan yang dapat disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Isu transparansi semakin meningkat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang didalamnya menyebutkan bahwa setiap apapun informasi yang akan diberikan diranah masyarakat atau publik harus tepat waktu, terbuka dengan terbukti dapat diakses oleh masyarakat secara cepat dan biaya yang mudah serta dengan cara yang sederhana agar dapat dipahami masyarakat (Kadek, 2015) Kualitas pengungkapan laporan keuangan membutuhkan keterbukaan atau disebut dengan transparansi oleh pemerintah daerah dalam bentuk pelaporan keuangan yang diberikan kepada masyarakat, karena masyarakat sangat membutuhkan adanya pelaporan keuangan tersebut dengan begitu masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengelola keuangan yang telah diberikan oleh masyarakat. Faktor yang menyebabkan isu transparansi semakin meningkat ialah hilangnya kepercayaan masyarakat dan publik serta para pengguna laporan keuangan terhadap pemerintahan daerah tentang bagaimana mengelola laporan keuangan, apakah dikelola dengan baik atau tidak serta faktor penyebabnya adanya penyerahan wewenang pengelolaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan aturan dalam pengelolaannya.

Pengungkapan secara konseptual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana melaporkan keuangan, secara teori dan prakteknya pengungkapan merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh untuk menyajikan informasi dalam bentuk pengungkapan penuh suatu statement keuangan, pengungkapan disebut juga sebagai penyediaan informasi keuangan lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk pengungkapan keuangan resmi (Yulia, 2010). Berdasarkan data yang didapat dari berbagai sumber tingkat pengungkapan LKPD yang sesuai dengan SAP di Indonesia rata-rata masih belum memenuhi syarat, seperti penelitian yang dilakukan (Suhardjantoetal 2010) hanya menemukan sekitar 51,56%, (Lesmana 2010) sekitar 22%, dan 35,45% dari (Liestiani 2008). Hal ini berarti pemerintah daerah belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dan belum mengungkapkan apa saja yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan (Dyah setyaningrum, 2012).

Pemerintah yang menggunakan teknologi informasi menjadi hal yang sangat menguntungkan dan penting pada saat ini, hal ini dikarenakan semakin banyaknya pengguna di internet maka informasi yang akan disampaikan akan mencapai lebih banyak pengguna dan masyarakat serta dengan biaya murah dapat meminimalkan penggunaan dana sehingga penyampaian informasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta memudahkan entitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara manual (Almilia, 2008). Tidak hanya masalah kerahasiaan dan tidak dipergunakan *website* daerah sebagaimana mestinya, hal yang sama juga berlaku mengenai laporan tentang APBD yang masih belum transparan. Seperti halnya diportal resmi milik pemerintah daerah pesisir selatan www.sinarpessel.go.id dan juga beberapa daerah di sumatera barat, menurut (Agustin, 2014) dari banyaknya *website* pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di sumatera barat yang diteliti oleh peneliti, terdapat hanya tujuh pemerintahan kabupaten dan kota atau hanya sekitar (36,84%) saja yang laporan pengelolaan APBD yang dapat dilihat oleh masyarakat, yang dapat dilihat pada menu “Transparansi Pengelolaan Anggaran” di *website* resminya. Hal ini sangat berbeda jika

dilihat dari portal resmi milik pemerintah kota bandung yakni www.bandung.go.id di *website* dimana dilaman utamanya langsung pemberitahuan APBD tanpa merepotkan penggunanya.

Masyarakat sangat memerlukan kualitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah di masing-masing daerahnya untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan yang seharusnya dikelola dengan baik, hal yang terpenting yang harus diketahui oleh masyarakat adalah apa yang menyebabkan terjadinya kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Dari beberapa penelitian sejenis dan terdahulu banyak terdapat hasil yang tidak sama antara satu penelitian dengan penelitian lainnya dan hasil yang tidak signifikan. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya variabel dan jumlah sampel yang digunakan untuk mengukur variable-variabel yang terdapat dalam penelitian tersebut (Ladya, 2017).

Sebelumnya juga telah ada penelitian mengenai hal ini yakni adanya penelitian sebelumnya yang meneliti tentang bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keuangan di internet banyak dilakukan di sektor lainnya dan organisasi yang mengharapkan laba dari setiap transaksi. Peneliti-peneliti nya yaitu Yacob triandy hudoyo (2014), Laswad et al (2001), Serrano et al. (2008), Sharma (2013) dan Brennan dan Hourigan, (2000), dan hanya sedikit beberapa penelitian yang dilakukan di lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Penelitian ini mengambil referensi dan merupakan reapiikasi dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Ladya, 2017) (Rahmayanti, 2018) (Laswad, 2005) (Dyah setyaningrum, 2012) (PARDOSI, 2018) (Afryansyah, 2013) dan peneliti-peneliti pendahulu lainnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni adanya perbedaan tempat pengambilan sampel serta tahun yang diteliti. Perbedaan selanjutnya adalah tahun populasi yang diambil yakni tahun 2019 sehingga bisa melihat apakah pada tahun 2019 sama hasilnya dengan penelitian-penelitian ditahun selanjutnya atau ada nya perbedaan hasil.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan adalah sebuah teori yang menggambarkan bagaimana hubungan antara *principal* dan *agent*, dalam teori keagenan ada dua pihak yang membuat dan melaksanakan suatu perjanjian yang telah disusun sebelumnya, kesepakatan atau perjanjian yang terjadi ketika pihak principal dalam hal ini masyarakat memberikan tanggung jawab kepada pihak lain (agen) yakni pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang akan disetujui bersama dalam pemerintahan (Jensen, 1976). Sering kali terjadi pertentangan didalam sebuah teori agensi, yakni akan terus terjadi pertentangan dan kepentingan yang bertolak belakang antara principal dan agen namun selain itu keduanya akan saling membutuhkan baik dalam hal kepentingan yang disebut dengan istilah *agency problem*. Masalah keagenan (*agency problem*) pada sector pemerintah daerah maupun sector swasta menjelaskan adanya upaya pengawasan dari principal untuk mengontrol dan mengawasi tindakan agen (Jensen dan Mecklin, 1976).

Teori Signaling

Teori *signalling* merupakan teori yang membantu menyelesaikan kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat, teori signalling ini merupakan tanda atau signal pemerintah kepada masyarakat yaitu dengan cara memberikan peningkatan dalam control system internal, memberikan laporan yang baik dan berkualitas, pengungkapan yang benar dan sesuai standar dan penjelasan yng lebih detail dalam *website* yang dapat dipahami oleh masyarakat (Puspita, 2012). Hubungan teori sinyal terhadap kinerja pemerintahan adalah dalam hal pengungkapan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah memberikan

sinyal positif terhadap masyarakat terkait dengan kinerja yang dilakukannya. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal peningkatan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah.

Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan

Kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah disebut dengan berbagai istilah, yang menurut para ahli antara lain tepat waktu (Courtis 1976, Whitred 1980), kecukupan artinya cukup item-item yang akan diungkapkan dalam pengungkapan (Buzby 1975), kelengkapan artinya lengkap dalam hal mengungkapkan item-item apa saja yang seharusnya diungkapkan (Barret, 1976), dan informative artinya mengandung informasi yang diperlukan oleh para penggunanya (Alford et al, 1993). tingkat kelengkapan sebagai karakteristik kualitas pengungkapan (Imhoff, 1992), berdasarkan pendapat dari Singhvi dan Desai (1971) dalam penelitian Ayu (2012) : menurut Andrian, (2010) karakteristik dari kualitas pengungkapan yakni harus terdapat didalamnya keandalan, kelengkapan, dan akurasi, yang menjadi acuan dalam kualitas pengungkapan tersebut yang menjadi sebuah indeks pengungkapan yang merupakan perbandingan antara jumlah item-item informasi yang seharusnya dapat diungkapkan dan dipenuhi dengan jumlah elemen yang mungkin dipenuhi. Semakin tinggi sebuah angka item dalam indeks pengungkapan, maka semakin tinggi juga kualitas pengungkapan. Berkualitasnya sebuah keputusan dipengaruhi oleh bagaimana kualitas pengungkapan pemerintah daerah yang diberikan melalui pelaporan keuangan yang di berikan kepada para penggunanya melalui suatu media. Variabel dependen diukur dengan menggunakan daftar *scoring indeks* (Garcia dan Garcia, 2010).

Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan arus kas keluar yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat hal ini yang dapat diberikan dalam hal memberikan peningkatan-peningkatan dalam hal mensejahterkan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang no 58 tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan daerah belanja daerah disebut sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Semakin tinggi belanja daerah, yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah seharusnya memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat, (Puspita, 2012) (Ratmono, 2013). Mengacu pada hal ini, seharusnya semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah daerah, maka semakin tinggi keinginan pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi belanja daerah pada *website* resmi pemerintahnya. Belanja daerah diukur dengan Log (realisasi belanja). Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut.

H1: Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas tingkat laporan keuangan pemerintah daerah.

Umur Administratif

Umur Administratif merupakan umur suatu organisasi pemerintahan yang disebut juga sebagai berapa lama organisasi tersebut berjalan setelah tahun pertama berdirinya, umur pemerintah daerah merupakan tahun dibentuknya dan berdirinya sebuah pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang pembentukan daerah. Teori signalling menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan signal kepada masyarakat, seperti halnya umur administratif pemerintah daerah yang ditampilkan dalam website pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat mengetahui seberapa lama pemerintah daerah itu berdiri, dengan lamanya umur administratif yang dimiliki suatu website pemerintah daerah akan menunjukkan kualitas yang lebih baik karena semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan

laporan keuangan (Dyah Setyaningrum, 2012). Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut.

H2: Umur administratif berpengaruh positif terhadap kualitas tingkat laporan keuangan pemerintah daerah.

Kekayaan Daerah

Kekayaan pemerintah daerah merupakan ukuran dalam menentukan kemakmuran suatu pemerintah daerah (Y.F, 2011). Semakin tinggi sebuah Kekayaan daerah semakin tinggi juga pengungkapan laporan keuangan diinternet oleh pemerintah, Afriansyah, (2013) Ratmono (2013) Dyah setyaningrum (2012) Santosa (2005) Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan daerah yang besar juga akan menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dan tuntutan transparansi oleh masyarakat harus terpenuhi. Pemerintah daerah bisa menyampaikan informasi keuangan dengan biaya yang lebih murah serta efisien dengan cara mengungkapkan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat (Pratama *et al*, 2015).Kekayaan daerah dapat diukur dengan melihat total asset yang ada didaerah tersebut dengan menggunakan Logaritma natural (Ln) untuk menghindari data yang tidak normal. Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut.

H3: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas tingkat laporan keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata para penduduk di dalam daerah, jumlah penduduk yang tinggi akan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan perkapita yang terdapat didalam suatu daerah. Pendapatan perkapita yang terdapat dalam masyarakat daerah dapat berpengaruh terhadap pengungkapan laporan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan tingginya angka pendapatan perkapita dalam *website* pemerintah daerah maka akan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat tersebut Perkembangan teknologi yang semakin pesat akan mendorong pemerintah untuk memberikan informasi melalui media internet di *website* pemerintah daerah. (Yacoeb triandy hudoyo, 2014). Pendapatan perkapita diukur dengan melihat PDRB perkapita suatu daerah dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut.

H4: Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap kualitas tingkat laporan keuangan pemerintah daerah.

Opini Audit

Opini audit merupakan salah satu penentu kualitas wajar atau tidaknya sebuah laporan keuangan, kesesuaian sebuah laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan standar yang telah ditetapkan yakni SAP. Pardosi, (2018) menyatakan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan predikat WTP akan cenderung termotivasi dan memberikan signal untuk memberikan informasi mengenai LKPD nya kepada publik dan masyarakat untuk menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan laporan keuangan sudah dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya jika pemerintah daerah mendapatkan opini selain WTP maka pemerintah daerah tersebut akan cenderung menutupi informasi mengenai hal ini dikarenakan pemerintah khawatir akan timbulnya persepsi negatif dari masyarakat. Variabel ini diukur dengan variable dummy dimana jika mendapatkan predikat WTP akan dinilai 1 dan apabila selain WTP akan dinilai 0. Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut.

H5: Opini audit berpengaruh positif terhadap kualitas tingkat laporan keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan nilai seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan potensi daerah, untuk dijadikan sebagai otonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. pendapatan asli daerah memiliki kepentingan didalamnya yang membuat pemerintah daerah lebih memilih membatasi bahkan menutup informasi mengenai pendapatan asli daerah kepada para pengguna laporan keuangannya. Dengan bertambahnya tinggi pendapatan asli daerah maka pemerintah akan berusaha menunjukkan bagaimana pendapatan asli daerah kepada masyarakat sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, PAD diukur dengan menjumlahkan jumlah total pendapatan asli daerah dibagi dengan total realisasi anggaran. Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut.

H6: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kualitas tingkat laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausatif, penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan karakteristik masalah seperti hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausatif memiliki tujuan agar dapat mengetahui bagaimana sebuah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Sugiyono.2005) Data yang digunakan adalah data sekunder

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yakni pemerintah kota dan pemerintah kabupaten yang terdapat di Indonesia. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive sampling* dengan Kriteria sbb:

- 1) Pemerintah daerah yang menampilkan setiap data-data yang akan digunakan dalam variabel atau diperlukan untuk seluruh variabel.
- 2) Pemerintah daerah yang mempunyai *website* yang dapat dengan mudah dilihat dan dijangkau secara umum dan langsung melalui media yakni internet.
- 3) *Website* pemerintah daerah yang dapat diakses secara sukarela.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dengan memilih beberapa kriteria yang beberapa datanya diambil dalam badan pemeriksa keuangan, badan pusat statistik dan *website* pemerintah daerah. Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Dengan mengambil data pada tahun sebelumnya yakni tahun 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang terdapat di BPK RI. (b) Studi pustaka yang dilakukan di perpustakaan fakultas ekonomi dan perpustakaan pusat Universitas Negeri Padang. (c) literatur ekonomi menggunakan sistem komunikasi internet yang berkaitan penelitian ini.

Variabel penelitian dan pengukuran variabel

Dalam penelitian ini digunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

Tabel 1
Pengukuran Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1.	Belanja Daerah (X1)	Log (realisasi belanja).	Rasio
2.	Umur admintrative (X2)	Berapa lama organisasi tersebut berdiri	Rasio
3.	Kekayaan Daerah (X3)	Ln(Total asset)	Rasio
4.	Pendapatan Perkapita (X4)	$Ppk = \frac{PDRB \text{ tahun } t}{\text{Penduduk daerah tahun } - t}$	Rasio
5.	Opini audit (X5)	Variabel dummy dengan cara memberi nilai 1 Pada laporan Keuangan yang mendapatkan predikat WTP dan nilai 0 selain WTP	Nominal
6.	Pendapatan Asli Daerah (X6)	$PAD = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Realisasi Anggaran PAD}}$	Rasio
7.	Kualitas pengungkapan laporan Keuangan dalam <i>Website</i> pemerintah daerah (Y)	$DISC = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item yang harus diungkapkan}} \times 100\%$	Rasio

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linear Berganda menggunakan program SPSS 22. Urutan Tahapan yang digunakan dalam menguji hipotesis pada penelitian ini adalah yang pertama analisis statistik deskriptif,), analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis, dan uji kelayakan model dengan melakukan uji asumsi klasik sebelumnya yakni (Uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Indonesia yang berjumlah 90 sampel setelah dipilih berdasarkan kriteria setelah dilakukan uji asumsi klasik dari 90 sampel data dilakukan outliers karna data tidak lulus uji F simultan sehingga data yang tersisa sebanyak $n = 72$.

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1 BD	72	15.91	18.19	17.3663	.35644
X2_UD	72	11	74	45.01	20.785
X3_KD	72	27.91	30.42	28.7335	.51801
X4_PpK	72	2862.63	95710.52	34944.4536	22291.85711
X5_OA	72	0	1	.99	.118
X6_PAD	72	24040093771	1148124668843	302690517930.81	309338075294.895
Y_KTP	72	.43	.90	.6497	.11390
Valid N (listwise)	72				

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini untuk membahas bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 3
Regresi Linear Berganda

Model	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-.543	.973			-.558	.579
X1_BD	.070	.045	.219		1.551	.126
X2_UA	-9.734E-5	.001	-.018		-.156	.876
X3_KD	-.011	.037	-.052		-.306	.760
X4_PpK	-1.024E-7	.000	-.020		-.159	.875
X5_OA	.283	.126	.293		2.251	.028
X6_PAD	1.188E-13	.000	.323		2.090	.041

F: 0.012

Adjusted *R Square*: 0.143

Berdasarkan Tabel 3, didapat secara sistematis hasil analisis regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\text{KTP} = - .543 + .070 \text{ BD} - 9.734 \text{ UA} - .011 \text{ KD} - 1.024 \text{ PpK} + .283 \text{ OA} + 1.118 \text{ PAD}$$

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur bagaimana dan seberapa besarnya sebuah variabel bebas didalam menjelaskan variasi perubahan variabel terikat. Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat hasil dari uji koefisien determinasi atau disebut juga *Adjusted R Square* pada penelitian ini sebesar 0.143 atau 14.3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen kualitas pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah dapat dijelaskan 14.3% oleh variabel dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya 85.7% (100%-14.3%) lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Uji statistik F (simultan)

Uji f digunakan untuk menguji secara bersama-sama pengaruh variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel dependen, Hasil yang didapat dari pengolahan statistik nilai F hitung < dari F tabel yakni $2.978 < 2,24$ dan nilai signifikannya $0.012 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model persamaan tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji statistik t (parsial)

Hipotesis pertama (BD), dilihat pada Tabel 3, dapat dilihat jika nilai t positif sebesar 1.551 artinya nilai t hitung $1.551 < \text{dari nilai t tabel } 1.996$ dan nilai signifikansi t dari BD lebih kecil dari pada nilai signifikansi α . Nilai tersebut adalah $0.126 < 0,05$. Hal ini artinya BD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KTP (kualitas pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah). **Hipotesis 1 ditolak.**

Hipotesis kedua UA, dilihat pada Tabel 3, dapat dilihat jika nilai t negatif sebesar -0.156 artinya nilai t hitung $-0,156 < \text{dari nilai t tabel } 1.996$ dan nilai signifikansi t dari UA lebih besar dari pada nilai signifikansi α . Nilai tersebut adalah $0.876 > 0,05$. Hal ini artinya UA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KTP (kualitas pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah). **Hipotesis 2 ditolak.**

Hipotesis ketiga KD, dilihat pada Tabel 3, dapat dilihat jika nilai t negatif sebesar -0.306 artinya nilai t hitung $-0,306 < \text{dari nilai t tabel } 1,996$ dan nilai signifikansi t dari KD

lebih besar dari pada nilai signifikansi α . Nilai tersebut adalah $0.760 > 0,05$. Hal ini artinya KD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KTP (kualitas pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah). **Hipotesis 3 ditolak.**

Hipotesis keempat PpK, dilihat pada Tabel 3, dapat dilihat jika nilai t PpK negatif sebesar -0.159 artinya nilai t hitung $-0,159 <$ dari nilai t tabel 1.996 dan nilai signifikansi t dari PpK lebih besar dari pada nilai signifikansi α . Nilai tersebut adalah $0.875 > 0,05$. Hal ini artinya PpK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KTP (kualitas pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah). **Hipotesis 4 ditolak.**

Hipotesis kelima OA, dilihat pada Tabel 3, dapat dilihat jika nilai t positif sebesar 2.251 artinya nilai t hitung $2.251 >$ dari nilai t tabel $1,996$ dan nilai signifikansi t dari OA lebih kecil dari pada nilai signifikansi α . Nilai tersebut adalah $0.028 < 0,05$. Hal ini artinya OA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KTP (kualitas pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah). **Hipotesis 5 diterima.**

Hipotesis keenam PAD, dilihat pada Tabel 3, dapat dilihat jika nilai t positif sebesar 2.090 artinya nilai t hitung $2.090 >$ dari nilai t tabel 1.996 dan nilai signifikansi t dari PAD lebih besar dari pada nilai signifikansi α . Nilai tersebut adalah $0.041 < 0,05$. Hal ini artinya PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KTP (kualitas pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah). **Hipotesis 6 diterima.**

PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kualitas Pengungkapan dalam *Website* Pemerintah Daerah

Dari hasil statistik yang didapat bisa diketahui bahwa BD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yakni KTP di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia sehingga hipotesis yang telah diajukan tidak sesuai dengan hasil penelitian, Hal ini mengindikasikan bahwa total belanja tidak memiliki pengaruh dan tidak berkaitan dengan kualitas pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa angka yang tinggi dalam belanja daerah tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan yang tinggi dalam *website* pemerintah daerah nya masing-masing. Hal ini lebih disebabkan karena kemungkinan tingginya jumlah belanja daerah dipemerintahan tidak membuktikan tingginya tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga BD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah. Hasil ini hampir sama dengan temuan penelitian Fachru Rozi (2018), Rora dan Martani (2012) yang menemukan jika belanja daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas pengungkapan informasi dalam *website* pemerintah daerah.

Mengacu pada hal ini, tinggi rendahnya belanja daerah tidak mempengaruhi kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah dan juga tidak mencerminkan tingginya tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah daerah, serta tidak mencerminkan keinginan pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi belanja daerah pada *website* resmi pemerintahnya. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah seharusnya dengan adanya belanja daerah yang tinggi maupun rendah, pemerintah tetap melakukan pengungkapan didalam *website* pemerintah daerah dan juga seharusnya semakin menambah motivasi pemerintah dalam hal memberikan informasi belanja daerah dalam *website* resminya, serta tingginya tingkat pelayanan yang baik dan berkualitas terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan dana yang dipakai oleh pemerintah daerah merupakan dana dari masyarakat, dan juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah

terhadap masyarakat sebagai wujud dari teori keagenan dan juga tuntutan dari masyarakat dan Undang-Undang.

Pengaruh Umur Administratif terhadap Kualitas Pengungkapan dalam *Website* Pemerintah Daerah

Dari hasil statistik yang didapat bisa diketahui bahwa UA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KTP di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia sehingga hipotesis yang telah diajukan tidak sesuai dengan hasil penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Rahmayani (2018), Khasanah (2014) dan Henny Agnecia Simbolon (2016) yang mengatakan bahwa UA pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat pengungkapan laporan pemerintah daerah hal ini bisa terjadi kemungkinan dikarenakan adanya rekrutman calon PNS yang dilakukan pada tahun bersangkutan, sehingga akan ada pegawai baru yang mengakibatkan kemampuan para pegawai disetiap bidang keuangan dapat dibilang sama atau hampir sama di kabupaten dan kota di Indonesia.

Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah seharusnya dengan lama atau tidaknya umur pemerintahan dalam suatu daerah, akan membuat pemerintah memahami bahwa kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam website resmi pemerintah daerah merupakan hal yang harus dilakukan dan diungkapkan oleh pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan teori signalling dimana pemerintah seharusnya menunjukkan signal atau tanda kepada masyarakat bahwa pemerintah mampu mengelola laporan keuangan sesuai dengan SAP dengan pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya sesuai dengan umur administratif yang dimiliki oleh pemerintah.

Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Kualitas Pengungkapan dalam *Website* Pemerintah Daerah

Dari hasil statistik yang didapat bisa diketahui bahwa KD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KTP di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia sehingga hipotesis yang telah diajukan tidak sesuai dengan hasil penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang tinggi tidak akan mempengaruhi banyaknya item informasi keuangan yang diungkapkan oleh pemerintah daerah dalam *website* masing-masing pemerintah daerah.

Seharusnya dengan jumlah kekayaan daerah yang masing-masing terdapat di pemerintahan daerah akan mendorong pemerintah agar meningkatkan transparansi melalui media internet yakni *website* pemerintah daerah sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini akan terhubung dengan teori agensi, dimana pemerintah yang selaku agen bertanggungjawab untuk transparan dalam hal mengungkapkan pelaporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah mengenai KD yang dikelolanya, walaupun nilainya tidak terlalu besar, *website* menjadi salah satu cara dalam hal mewujudkan transparansi ini karena masyarakat cenderung sudah mengenal internet sehingga transparansi dapat dilakukan secara efisien dan secara efektif. Hasil ini sejalan dengan hasil temuan beberapa peneliti terdahulu yakni Ladya dan Johan (2016), Hudoyono dan Mahmud (2014), Yurisca dan Tri (2011), Fachru Rozi (2018), Afriansyah dan Haryanto (2013) yang berpendapat bahwa KD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan sukarela di internet oleh pemda.

Saran yang dapat diberikan untuk pemerintah daerah seharusnya dengan jumlah kekayaan daerah yang masing-masing terdapat di pemerintahan daerah akan mendorong pemerintah agar meningkatkan transparansi melalui media internet yakni *website* pemerintah daerah sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, hal ini akan terhubung dengan teori agensi, dimana pemerintah yang selaku agen bertanggungjawab untuk

transparan dalam pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah mengenai kekayaan daerah yang dikelolanya, walaupun nilainya tidak terlalu besar, dan *website* menjadi salah satu cara dalam hal mewujudkan transparansi ini karna masyarakat cenderung sudah mengenal internet sehingga transparansi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pengaruh Pendapatan perKapita terhadap Kualitas Pengungkapan dalam *Website* Pemerintah Daerah

Dari hasil statistik yang didapat bisa diketahui bahwa PpK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KTP di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia sehingga hipotesis yang telah diajukan tidak sesuai dengan hasil penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita yang tinggi tidak akan mempengaruhi banyaknya item informasi keuangan yang diungkapkan oleh pemerintah daerah dalam *website* masing-masing pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan jika pendapatan masyarakat yang tinggi belum tentu mencerminkan tingkat kepedulian masyarakat akan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Masyarakat cenderung lebih peduli dan sibuk mengurus keuangan pribadi masing-masing individu, dan masyarakat banyak yang beranggapan bahwa masalah keuangan daerah bukan sesuatu hal yang harus mereka terlibat di dalamnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Ladya dan Johan (2016), Dewi (2013), Wau dan Ratmono (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan perkapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah.

Saran yang dapat diberikan untuk pemerintah daerah seharusnya dengan jumlah pendapatan perkapita yang masing-masing terdapat dipemerintahan daerah akan mendorong pemerintah agar meningkatkan transparansi melalui media internet yakni *website* pemerintah daerah sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, meskipun masyarakat ingin mengetahuinya tau tidak hal ini akan terhubung dengan teori agensi, dimana pemerintah yang selaku agen bertanggungjawab untuk transparan dalam pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah mengenai pendapatan perkapita yang dikelolanya, walaupun nilainya tidak terlalu besar, ini dimaksudkan agar masyarakat bisa menilai bahwa pendapatan perkapita yang didapat masyarakat bisa dikelola oleh pemerintah sehingga masyarakat percaya kepada pemerintah.

Pengaruh Opini Audit terhadap Kualitas Pengungkapan dalam *Website* Pemerintah Daerah

Dari hasil statistik yang didapatkan diketahui bahwa OA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga hipotesis yang diajukan sebelumnya didukung dan sesuai dengan hasil penelitian, atau dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa peneliti terdahulu yakni Akhmad Priharjanto (2018), dan Ietje Nazarrudin (2019) yang menemukan bahwa OA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di internet dalam *website* pemerintah daerah dan *internet financial reporting melalui e government*. Penelitian ini menemukan bahwa OA yang didapatkan oleh pemerintah daerah memotivasi pemerintah dalam hal pengungkapan informasi keuangan, penelitian ini menemukan hasil yang sama dengan peneliti sebelumnya yakni OA berpengaruh signifikan dan positif, dengan mendapatkan opini WTP oleh pemda berarti tingkat kualitas pengungkapan laporan keuangan yang dihasilkan lebih sesuai dengan SAP yang mengindikasikan kualitas laporan keuangan yang bagus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa OA memiliki pengaruh terhadap kualitas pengungkapan dalam *website* pemerintah daerah.

Saran yang dapat diberikan untuk pemerintah daerah dengan berpengaruhnya opini audit terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah daerah berarti pemerintah daerah memiliki tugas penting dengan mengungkapkan informasi lebih banyak mengenai hal apa saja yang menjadi kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah daerah. Opini audit yang masing-masing terdapat dipemerintahan daerah akan mendorong pemerintah agar meningkatkan transparansi melalui media internet yakni *website* pemerintah daerah sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, hal ini akan terhubung dengan teori agensi, dimana pemerintah yang selaku agen bertanggungjawab untuk transparan dalam pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah mengenai keuangan yang dikelolanya, ini dimaksudkan agar masyarakat bisa menilai bahwa keuangan yang diberikan oleh masyarakat bisa dikelola oleh pemerintah sehingga masyarakat percaya kepada pemerintah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kualitas Pengungkapan dalam *Website* Pemerintah Daerah

Dari hasil statistik yang didapatkan diketahui bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengungkapan dalam website pemerintah daerah di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga hipotesis yang diajukan sebelumnya didukung dan sesuai dengan hasil penelitian, atau dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yakni Laswad et.al (2005) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah yang membuktikan rasio PAD berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan dalam website pemerintah daerah. Pemda yang memiliki PAD tinggi akan menunjukkan kepada stakeholdernya dan masyarakat jika pemerintah telah menghasilkan kinerja yang berkualitas dan tinggi. Kinerja yang tinggi ini merupakan sebuah sinyal dari manajemen publik yang baik dan pemda yang memiliki performa yang buruk akan berusaha menutupi pengungkapan dan akan lebih memilih untuk membatasi akses informasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang baik akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dan menggunakan teknik pengungkapan yang lebih baik sesuai dengan teori signalling.

Saran yang dapat diberikan untuk pemerintah daerah dengan berpengaruhnya opini audit terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah daerah berarti pemerintah daerah memiliki tugas penting dengan mengungkapkan informasi lebih banyak mengenai hal apa saja yang menjadi kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah daerah. Opini audit yang masing-masing terdapat dipemerintahan daerah akan mendorong pemerintah agar meningkatkan transparansi melalui media internet yakni *website* pemerintah daerah sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, hal ini akan terhubung dengan teori agensi, dimana pemerintah yang selaku agen bertanggungjawab untuk transparan dalam pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah mengenai keuangan yang dikelolanya, ini dimaksudkan agar masyarakat bisa menilai bahwa keuangan yang diberikan oleh masyarakat bisa dikelola oleh pemerintah sehingga masyarakat percaya kepada pemerintah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut hasil pengolahan data statistik pada penelitian ini diperoleh hasil Belanja Daerah, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Pengungkapan dalam *Website* Pemerintah Daerah.

2. Menurut hasil pengolahan data statistik pada penelitian ini diperoleh hasil Umur Administratif Daerah, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Pengungkapan dalam *Website* Pemerintah Daerah.
3. Menurut hasil pengolahan data statistik pada penelitian ini diperoleh hasil Kekayaan Daerah, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Pengungkapan dalam *Website* Pemerintah Daerah.
4. Menurut hasil pengolahan data statistik pada penelitian ini diperoleh hasil Pendapatan Perkapita, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Pengungkapan dalam *Website* Pemerintah Daerah.
5. Menurut hasil pengolahan data statistik pada penelitian ini diperoleh hasil Opini Audit, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Pengungkapan dalam *Website* Pemerintah Daerah.
6. Menurut hasil pengolahan data statistik pada penelitian ini diperoleh hasil Pendapatan Asli Daerah, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Pengungkapan dalam *Website* Pemerintah Daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang bisa diperbaiki untuk penelitian berikutnya :

1. *Adjusted R square* pada penelitian ini hanya sebesar 14.3%. Sehingga masih ada 85.7% lagi faktor lain yang dapat menjelaskan Kualitas pengungkapan laporan Keuangan dalam website pemerintah daerah yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena beberapa keterbatasan peneliti.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data dalam laporan Keuangan pemerintah daerah tahun 2019, sehingga kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
3. Penelitian ini hanya memiliki 90 sampel dari 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia dimana masing-masing provinsi.

Saran

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah dalam membuat aturan- aturan internal maupun aturan eksternal dalam pemerintah daerah sehingga lebih baik kedepannya dalam hal kualitas pengungkapan laporan Keuangan dalam website pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan dan menambah variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini seperti, kompetisi politik, jumlah temuan, jumlah penduduk, temuan audit dan lain sebagainya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih banyak sampel dengan memperluas sampel dan menambah tahun yang akan diteliti. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan proksi lain dalam pengukuran setiap variabel sehingga hasilnya lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, R. D. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting* , 2(3): 1-11.
- Agustin, H. (2014). Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran Pada *Website* Pemkab/Pemkot Di Propinsi Sumatera Barat. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) .
- Almilia, L. S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela “internet financial and sustainability reporting”. *JAAI* .
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- BPK. (2019). Standard pemeriksaan Keuangan Negara, peraturan badan pemeriksa Keuangan republik indonesia nomo 1 tahun 2017
- Cheisviyanny, charoline, herlina helmy, sany dwita (2018). Analisis Kualitas *Website* pemerintah daerah kabupaten/ kota diprovinsi sumatera barat. SNKN 2018
- Dewi, A.S. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E-Government. Skripsi FEB UNDIP Semarang.
- Dyah Setyaningrum, F. S. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* Volume 9 Nomor 2.
- Effendy, Y. (2013). Tinjauan Hubungan Opini WTP BPK Dengan Kasus Korupsi Pada Pemda Di Indonesia Kajian Manajemen Keuangan Pemerintah, Hubungan Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Pemeriksa (auditor). *Jurnal Manajemen & Bisnis*, , 13(1), 46–55.
- Garcia-Sanchez *et al.* 2013. *Determinants of Corporate Social Disclosure in Spanish Local Government. Journal of Cleaner Production* 39, 60-72.
- Hendriyani, ririn. Afrizal tahar (2015) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Ekonomi*, 25-33
- Jensen, M. C. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, , 3(4): 303-360.
- Kadafi, M. E., 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. Universitas Widyatama.
- Kadek Aris Dwi Pratama, D. N. (2015). Pengaruh kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah terhadap pelaporan Keuangan pemerintah daerah (Stuai pada pemerintah kabupaten/kota di bali tahun 2010-2013) . *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Kawedar, W. ., (2008). Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Akuntansi*, 3(3), 1–11.
- Ladya Risqa Ayu Rosita S, J. A. (Jember, 2017). Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam *Website* Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XX*.
- Laswad, F. (2005). Determinants Of Voluntary Internet Financial Reporting By Local Government Authorities. *Journal Of Accounting And Publik Policy* , 24; 101–121.
- Liputan6.Com. (2015). [Http://Tekno.Liputan6.Com/Read/2197413/Jumlah-Pengguna-Internet-Indonesia-Capai-881juta](http://Tekno.Liputan6.Com/Read/2197413/Jumlah-Pengguna-Internet-Indonesia-Capai-881juta). (Diakses : 20 juni 2020).
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Martani, *et al.* 2013. *Disclosure of Non-Financial Information about Publik Service on the Official Website of Local Governments in Indonesia*.
- Martani, *et al.* 2014. *Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, Vol. 60, No. 3.
- Medina, F. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia. Skripsi Sarjana (Online).
- Nazarrudin, ietje (2019) *the effects of government characteristics, complexity, audit findings, audit opinions on the level of provincial government financial statement discolorure in Indonesia*. Artikel. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Pratama, K. A. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1* , 3(1): 1-12.
- Priharjanto, akhmad, Yusniar Yuliana Wardani (2012). Pengaruh temuan, tingkat penyimpangan, opini audit, dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. *Artikel politeknik keuangan Negara STAN*.
- Puspita, R. M. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam *Website* Pemda. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin .
- Rahmayanti, D. (2018). Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia . *Skripsi*.
- Ratmono, D. (2013). Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Internet: Pengujian Teori Institusional Dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi* , 1(2): 28-48.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2010. Undang-Undang Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2011. Praturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Rora Puspita . 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam *Website* Pemda. Depok.
- Sasmita, raymundo patria hayusasmita . 2019. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap *understadability* dalam Kualitas Informasi Dalam *Website* Pemda. ISSN, universitas atmajaya
- Santosa, P. B. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri. *Dinamika Pembangunan*. Vol. 2 No. 1.
- Sekaran, Uma, (2006). Metodologi penelitian untuk bisnis, Jakarta: Salemba Empat

- Setyaningrum, D., & Syafitri, F (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan Keuangan. *Jurnal akuntansi dan Keuangan indoneesia* 9 (2) : 154-170
- S.I., L. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia. . *Thesis*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Sinaga, Y. F. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah . *Skripsi*.
- Utama, shafira ramadhia , suardi. (2019). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit BPK terhadap *understandability* dalam Kualitas laporan Keuangan. ISSN. Universitas atmajaya
- Wau, I., & Ratmono. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4): 1-12
- Y.F, S. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemda. . *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yacoeb Triandy Hudoyo, A. M. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Accounting Anylisis Journal* .
- Yulianingtyas, R. R. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Stuai Empiris Pada Kabupaten / Kota Di Indonesia). . *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.